

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN



**DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur selayaknya kami panjatkan ke Hadirat Ilahi Rabbi, karena berkat perkenannya pada kesempatan ini Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) Kota Binjai tahun 2024 bisa kami susun. Penyusunan FSVA ini merupakan salah satu bahan informasi untuk mengetahui situasi ketahanan dan kerentanan yang bisa menyebabkan kerawanan pangan di Kota Binjai. Secara umum, manfaat FSVA ini adalah sebagai acuan dalam perencanaan antisipasi dan penanganan wilayah – wilayah desa yang rentan terhadap kerawanan pangan melalui penjenjangan prioritas.

Rasio yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan , serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang hasil analisisnya tidak lagi mengelompokkan suatu Kelurahan kedalam klasifikasi sangat rawan sampai dengan sangat tahan, tapi berupa rekomendasi yang mengutamakan penanganan kerentanan pangan berdasarkan prioritas, dari yang sangat prioritas sampai ke tidak prioritas.

Dengan penyusunan Peta FSVA Kota Binjai Tahun 2024 ini semoga dapat memberikan informasi secara tepat mengenai kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di Kota Binjai, sehingga dapat dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan bagi Pemerintah.

Demikian FSVA ini disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang situasi ketahanan dan kerentanan pangan di Kota Binjai pada Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	2
1.3. Metodologi	5
BAB II	
KETERSEDIAAN PANGAN	8
2.1. Lahan Pertanian	8
2.2. Produksi	8
2.3. Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan	13
2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan	13
BAB III	
AKSES PANGAN	15
3.1. Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah	15
3.2. Akses Transportasi	16
3.3. Strategi Peningkatan Akses Pangan	17
BAB IV	
PEMANFAATAN PANGAN	18
4.1. Akses Terhadap Akses Air Bersih	18
4.2. Rasio Tenaga Kesehatan	18
4.3. Dampak (OUTCOME) Dari Status Kesehatan	20
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan	21
BAB V	
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT	25
5.1. Kondisi Ketahanan Pangan	25
5.2. Faktor Penyebab Kerentanan Pangan	26
BAB VI	
REKOMENDASI KEBIJAKAN	27
PENUTUP	29
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Indikator FSVA Kabupaten 2023	5
Tabel 1.2	Bobot Indikator Individu	7
Tabel 2.1	Produksi Serelia Pokok dan Ubi- Umbian 2019 – 2023 (Ton)	9
Tabel 2.2	Produksi Total Serelia per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi 2019 – 2023	9
Tabel 2.3	Produksi Padi 2019 – 2023 (Ton)	10
Tabel 2.4	Produksi Jagung 2019 – 2023 (Ton)	11
Tabel 2.5	Produksi Ubi Kayu 2019 – 2023 (Ton)	11
Tabel 2.6	Produksi Ubi Jalar 2019 – 2023 (Ton)	12
Tabel 2.7	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi berdasarkan Prioritas	13
Tabel 3.1	Presentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Binjai	15
Tabel 3.2	Sebaran Desa dengan tingkat Kesejahteraan Terendah berdasarkan Skala Prioritas	16
Tabel 4.1	Sebaran Kelurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas	18
Tabel 4.2	Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan Berdasarkan Skala Prioritas	19
Tabel 4.3	Penderita Gizi Buruk 2019 – 2023	20
Tabel 4.4	Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	21
Tabel 5.1	Sebaran Jumlah Kelurahan Berdasarkan Prioritas	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi	3
Gambar 2.1	Produksi Serelia Pokok dan Umbi – Umbian 2019 – 2023	9
Gambar 2.2	Produksi Total Serelia per Tahun 2019- 2023	10
Gambar 2.3	Produksi Padi 2019 – 2023 (Ton)	10
Gambar 2.4	Produksi Jagung 2019 – 2023 (Ton)	11
Gambar 2.5	Produksi Ubi Kayu 2019 – 2023 (Ton)	12
Gambar 2.6	Produksi Ubi Jalar 2019 – 2023 (Ton)	12
Gambar 2.7	Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi berdasarkan Prioritas	13
Gambar 3.1	Sebaran Desa dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah berdasarkan Skala Prioritas	16
Gambar 4.1	Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan berdasarkan Skala Prioritas	19
Gambar 4.2	Grafik Penderita Gizi Buruk	20
Gambar 4.3	Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan	21
Gambar 5.1	Sebaran Jumlah Desa Prioritas 2 per Kecamatan	26
Gambar 5.2	Sebaran Jumlah Desa Prioritas 3 per Kecamatan	26
Gambar 6.1	Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan	27

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi ketahanan pangan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.
3. FSVA Kota Binjai merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah kelurahan. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa. Lima indikator dalam penyusunan FSVA Kota Binjai.
4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; dan (2) Desa dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; dan (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.
5. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan prioritas 3 rentan pangan rendah. Desa/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.
6. Hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa Kelurahan rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 21 Kelurahan dari 37 Kelurahan yang ada di Kota Binjai (56,76%). Tidak ada Kelurahan di Kota Binjai yang masuk dalam Prioritas 1 (Kelurahan rentan pangan), Kelurahan yang masuk dalam Prioritas 2 terdiri dari 5 Kelurahan (13,52%) yaitu Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Bakti Karya, Kelurahan Tanah Seribu, Kelurahan Rambung Timur di Kecamatan Binjai Selatan dan Kelurahan Tangsi di Kecamatan Binjai Kota. Sementara Kelurahan yang masuk ke dalam Prioritas 3 sebanyak 16 Kelurahan (43,24%) yaitu Kelurahan Pujidadi, Kelurahan Binjai Estate, Kelurahan Rambung Dalam, Kelurahan Rambung Barat di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Setia, Kelurahan Binjai di Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Mencirim, Kelurahan Tunggurono, Kelurahan Timbang Langkat, Kelurahan Tanah Tinggi di Kecamatan Binjai Timur, Kelurahan Jati Negara,

Kelurahan Kebun Lada, Kelurahan Cengkeh Turi di Kecamatan Binjai Utara serta Kelurahan Limau Sundai, Kelurahan Payaroba, dan Kelurahan Suka Maju di Kecamatan Binjai Barat.

7. Faktor yang mempengaruhi daerah rentan pangan Kota Binjai adalah pada bobot rasio penduduk tidak sejahtera, bobot rasio sarana penyedia pangan, dan bobot rasio tenaga kesehatan.
8. Karakteristik Kelurahan rentan pangan ditandai dengan (1) masih banyak keluarga dengan kondisi kurang sejahtera, (2) sarana pangan dengan jumlah penduduk belum memadai, (3) Kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut dilihat dari rasio tenaga kesehatan dalam melayani jumlah penduduk wilayah tersebut.
9. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kota Binjai diarahkan pada kegiatan:
 - a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
 - b. Peningkatan produktivitas lahan pertanian.
 - c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
 - d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
 - e. Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) di setiap Kelurahan dengan melengkapi sarana dan prasarana alat kesehatan di setiap Puskesmas Pembantu.
 - f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing industri kreatif dengan pemanfaatan IPTEK.
 - g. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pemerataan penyebaran tenaga kesehatan di setiap Kelurahan.
 - h. Peningkatan kinerja layanan RSUD dan Puskesmas Induk atau Puskesmas Pembantu (PUSTU) sesuai standard dan keselamatan pasien.
 - i. Pengadaan cadangan pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Binjai terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 37 (tigapuluh tujuh) Kelurahan dengan total penduduk sebesar 308.589 jiwa (BPS). Kota Binjai secara geografis berada pada 3° 31' 40" - 3° 40' 2" Lintang Utara dan 98° 27' 3" – 98° 32' 32" Bujur Timur dan terletak 28 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km² dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang. Batas area di sebelah Utara adalah Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Secara klimatologis, Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan dan musim kemarau biasanya ditandai dengan jumlah hari hujan pada tiap bulan terjadinya musim. Kecamatan yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Binjai Selatan sebesar 283,5 mm³/16 hari hujan dan Kecamatan Binjai Barat sebesar 220,67 mm³/14 hari hujan.

Perekonomian Kota Binjai tergantung pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang masih mempunyai peranan tinggi terhadap **PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan**. Akan tetapi sektor ini tahun 2023 meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya dimana tahun 2022 peranannya naik dari 4,18 % menjadi 4,75%. Kenaikan ini disebabkan semua subsektor yang ada dalam sektor perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor, sektor kontruksi dan sektor industri pengolahan mengalami kenaikan peranan.

Untuk PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (milliar rupiah) di Kota Binjai Tahun 2023 sebesar 47.678,59, hal ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 13.315,95. Kenaikan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kenaikan yaitu dari 4.026,28 (30,24%) pada Tahun 2022 menjadi 4.378,22 (30,28%) pada Tahun 2023.

PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha (milliar rupiah) di Kota Binjai Tahun 2023 sebesar 8.907,14, hal ini menunjukkan kenaikan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 8.503,58 kenaikan ini disebabkan semua sub sektor yang ada dalam sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami kenaikan yaitu dari 2.652,55 pada Tahun 2022 menjadi 2.799,23 pada Tahun 2023. Selain sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor yang mengalami kenaikan Tahun 2023 adalah sektor Konstruksi, yaitu dari 951,96 Tahun 2022 menjadi 980,15 pada Tahun 2023. Sektor Industri Pengolahan mengalami kenaikan dari 893,79 Tahun 2022 menjadi 922,88 pada Tahun 2023. Kondisi kenaikan ini disebabkan pertumbuhan ekonomi disetiap sektor sudah membaik dan tingkat inflasi yang mulai menurun, yang menyebabkan kemampuan belanja masyarakat menjadi naik.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas- FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas - FIA*) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2022.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

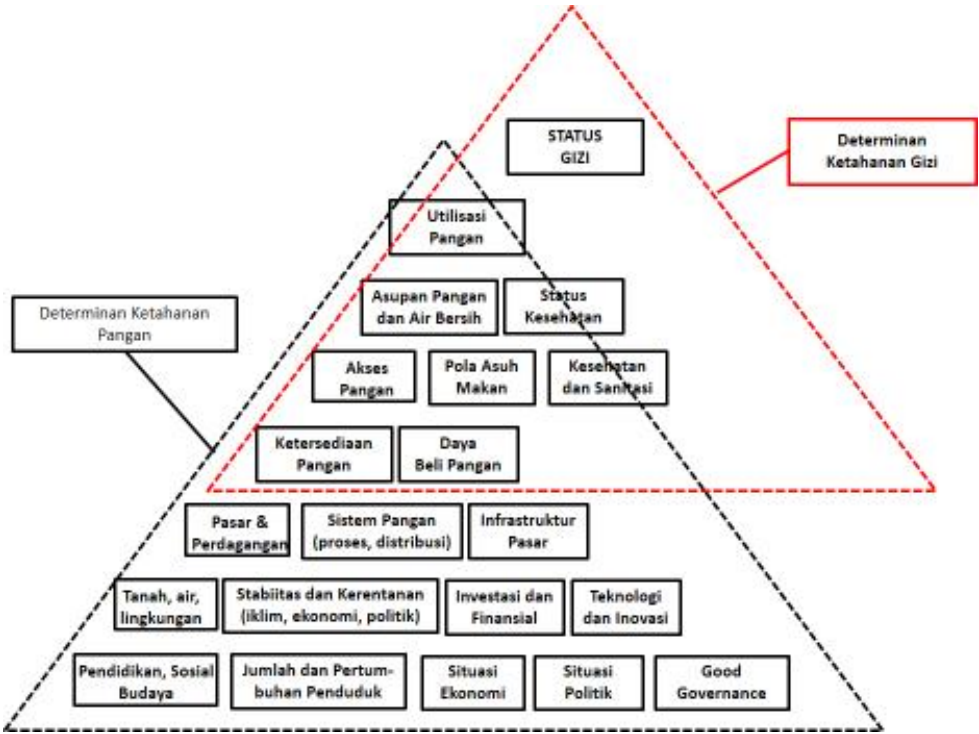
Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam

pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (*food security*) yang dianut oleh *Food and Agricultural Organisation* (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal *food security* yang dihasilkan oleh *World Food Summit* tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya *nutrition security* yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumah tangga, maka *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai *Food and Nutrition Security*. Pada tahun 2012 FAO¹ mengajukan definisi *food security* menjadi *food and nutrition security* untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya *Standing Committee on Nutrition* (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 2013² juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (*food security*) menjadi ketahanan pangan dan gizi (*food and nutrition security*). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai **ketahanan pangan dan gizi** seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Pemanfaatan pangan merujuk pada **penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu** untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasiditensi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

¹ Disampaikan pada Committee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia

² Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di NewYork

1.3. METODOLOGI

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2023

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	Luas lahan pertanian dibandingkan dengan jumlah penduduk	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2023
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2021, BPS Jumlah Rumah Tangga 2023 dari Sensus Penduduk (SP) 2023
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan terendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Jumlah Penduduk Desa dari SP 2023
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadam melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2021, BPS Dan Dinas Perhubungan

C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan 2023
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2021, BPS, Dinas Kesehatan 2023

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Gobal Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

- a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
- b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^n a_i X_{ij} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

- Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
- a_i : Bobot masing-masing indikator
- X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya

indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot	
		Kabupaten	Kota
1.	Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk	1/6	-
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga	1/6	1/3
Sub Total		1/3	1/3
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6	1/6
Sub Total		1/3	1/3

- c. Mengelompokkan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^9 a_i c_{ij} \dots\dots\dots (2)$$

Dimana:

- K_j : *cut off point* komposit ke- j
 a_i : Bobot indikator ke- i
 c_{ij} : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke- i kelompok ke- j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasi sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua penduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB II

KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan¹. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Khusus untuk Analisa wilayah kelurahan hanya digunakan (5) lima indikator. Mengingat ketersediaan pangan di perkotaan secara umum tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari pedagang antar wilayah, maka pada perhitungan komposit wilayah kelurahan di perkotaan hanya didasarkan pada jumlah sarana dan prasarana ekonomi. Indikator luas lahan pertanian tidak digunakan dalam analisis komposit wilayah perkotaan.

2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kota Binjai telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 3 % dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Binjai pada tahun 2023 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kota Binjai yang menyumbang 89,69% dari total produksi sereal Kota Binjai. Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.1, produksi umbi-

¹ Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

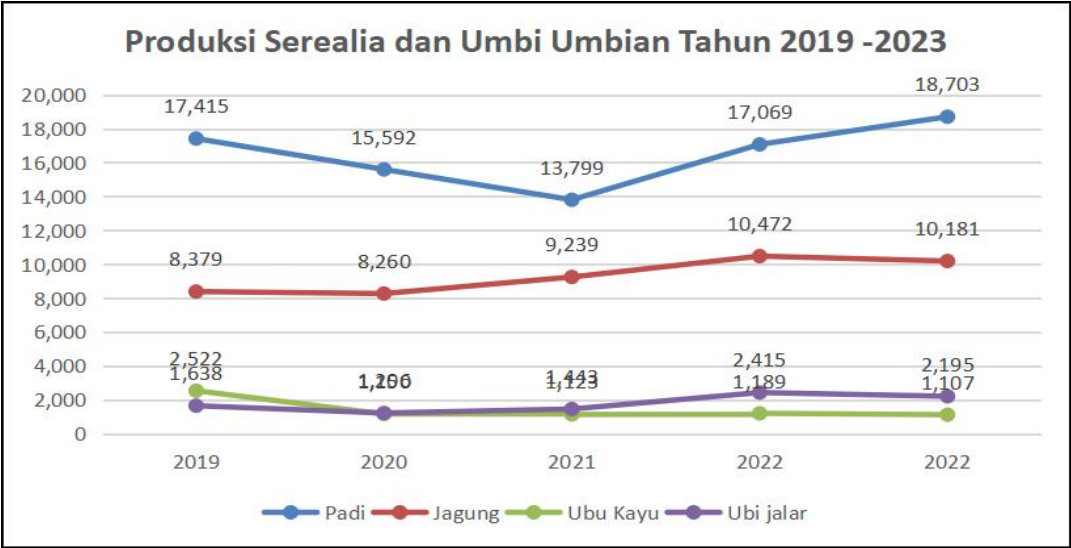
umbian di Kota Binjai mengalami penurunan sejak tahun 2019 – tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya luas tanam dan produktivitas. Produksi padi meningkat 7,4 % selama 5 tahun, yaitu dari pencapaian produksi 17.415 ton tahun 2019 menjadi 18.703 ton pada tahun 2023, hal ini disebabkan berkurangnya luas tanam dan penurunan produktivitas.

Tabel 2.1 Produksi Serealial Pokok dan Umbi-umbian 2019-2023 (Ton)

Serealial	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata 5 tahun
Padi	17.415	15.592	13.799	17.069	18.703	16.516
Jagung	8.379	8.260	9.239	10.472	10.181	9.306
Ubi Kayu	2.522	1.150	1.123	1.189	1.107	1.418
Ubi Jalar	1.638	1.206	1.443	2.415	2.195	1.779
Jumlah	29.954	26.208	25.604	31.145	32.186	

Sumber: Binjai Dalam Angka 2019-2023, BPS

Gambar 2.1 Produksi Serealial Pokok dan Umbi – Umbian 2019-2023



Tahun 2023, total produksi serealial dan umbi-umbian mencapai 18.703 ton padi, 10.181 ton jagung, 1.107 ton ubi kayu, dan ubi jalar 2.195 ton.

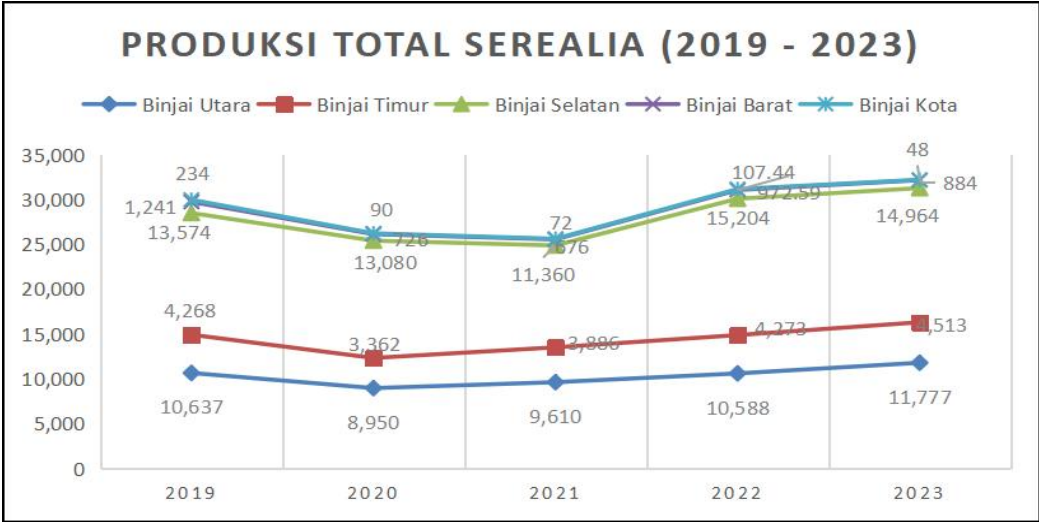
Total produksi serealial dan laju pertumbuhan produksi tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 7,45 %, yaitu dari total produksi tahun 2019 sebesar 29.954 ton menjadi 32.186 ton pada tahun 2023. Sebaran total produksi serealial selama 5 tahun terbesar terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 32.186 ton dan terkecil pada tahun 2021 sebesar 25.604 ton. Produksi serealial pertahun dan laju pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Produksi Total Serealial per Tahun dan Laju Pertumbuhan Produksi (2019-2023)

Kecamatan	Produksi Total Serealial					Laju Pertumbuhan 2019 - 2023
	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Binjai Utara	10.637	8.950	9.610	10.588	11.777	12,91
2. Binjai Timur	4.268	3.362	3.886	4.273	4.513	9,94
3. Binjai Selatan	13.574	13.080	11.360	15.204	14.964	15,47
4. Binjai Barat	1.241	726	676	972	884	(13,65)
5. Binjai Kota	234	90	72	107	48	(88,07)
Jumlah	29.954	26.208	25.604	31.145	32.186	

Sumber: Binjai Dalam Angka 2019-2023, BPS

Gambar 2.2 Produksi Total Serealia



Padi

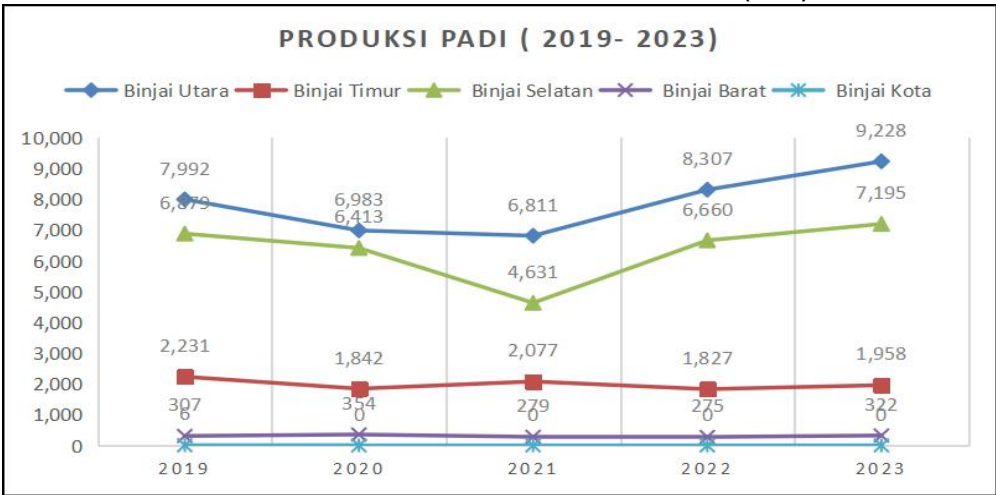
Produksi padi pada tingkat kecamatan di Kota Binjai selama 5 tahun terakhir (2019-2023) telah dianalisis dan disajikan pada Tabel 2.3. Produksi padi mengalami peningkatan pada tahun 2023 di 5 kecamatan, peningkatan terjadi di kecamatan Binjai Utara, Binjai Selatan, Binjai Timur, dan Binjai Barat. Produksi padi tertinggi di Kecamatan Binjai Utara pada tahun 2023 sebesar 9.228 ton.

Tabel 2.3. Produksi Padi 2019 - 2023 (Ton)

Kecamatan	Padi				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Binjai Utara	7.992	6.983	6.811	8.307	9.228
2. Binjai Timur	2.231	1.842	2.077	1.827	1.958
3. Binjai Selatan	6.879	6.413	4.631	6.660	7.195
4. Binjai Barat	307	354	279	275	322
5. Binjai Kota	6	0	0	0	0
Jumlah	17.415	15.592	13.798	17.069	18.703

Sumber: Binjai Dalam Angka 2019-2023, BPS

Gambar 2.3. Produksi Padi 2019 – 2023 (Ton)



Jagung

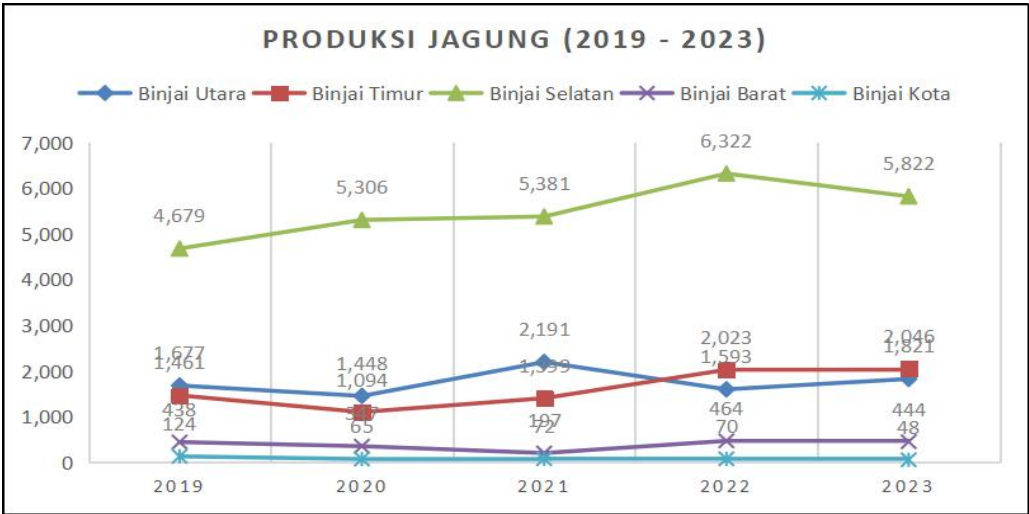
Pada tahun 2023, produksi jagung mencapai 10.181 ton. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar 21,51 % dari tahun 2019. Kenaikan produksi pada tahun 2022 disebabkan kenaikan luas panen dan produktivitas. Sebaran produksi jagung terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 10.472 ton. Kontribusi terbesar terjadi di Kecamatan Binjai Selatan sebesar 6.332 ton, menyusul Kecamatan Binjai Timur sebesar 2.023 ton dan terendah Kecamatan Binjai Kota sebesar 70 ton. Secara rinci produksi jagung tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Produksi Jagung 2019 - 2023 (Ton)

Kabupaten	Jagung				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Binjai Utara	1.677	1.448	2.191	1.593	1.821
2. Binjai Timur	1.461	1.094	1.399	2.023	2.046
3. Binjai Selatan	4.679	5.306	5.381	6.332	5.822
4. Binjai Barat	438	347	197	464	444
5. Binjai Kota	124	65	72	70	48
Jumlah	8.379	8.260	9.240	10.472	10.181

Sumber: Binjai Dalam Angka 2019-2023, BPS

Gambar 2.4. Produksi Jagung 2019 – 2023 (ton)



Ubi Kayu

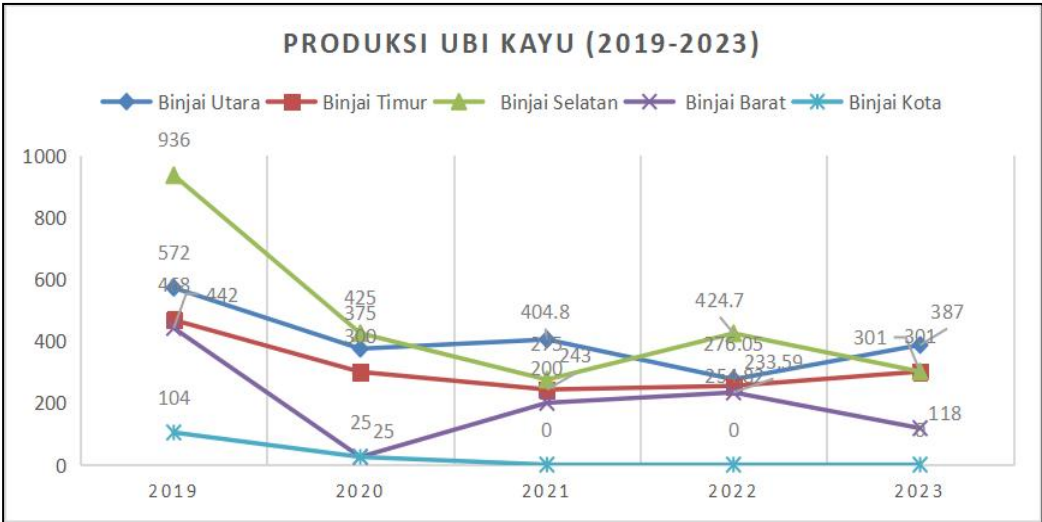
Produksi ubi kayu menurun dari 2.522 ton pada tahun 2019 menjadi 1.107 ton pada tahun 2023. Daerah yang merupakan sentra produksi ubi kayu terbesar di tahun 2023 meliputi Kecamatan Binjai Utara dengan produksi 387 ton. Rincian produksi ubi kayu tahun 2019-2023 disajikan pada Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Produksi Ubi Kayu 2019 - 2023 (Ton)

Kecamatan	Ubi Kayu				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Binjai Utara	572	375	404,80	276,05	387
2. Binjai Timur	468	300	243	254,82	301
3. Binjai Selatan	936	425	275	424,7	301
4. Binjai Barat	442	25	200	233,59	118
5. Binjai Kota	104	25	0	0	0
Jumlah	2.522	1.150	1.122,8	1.189,2	1.107

Sumber: Binjai Dalam Angka 2019-2023, BPS

Gambar 2.5. Produksi Ubi Kayu 2019 – 2023 (Ton)



Ubi Jalar

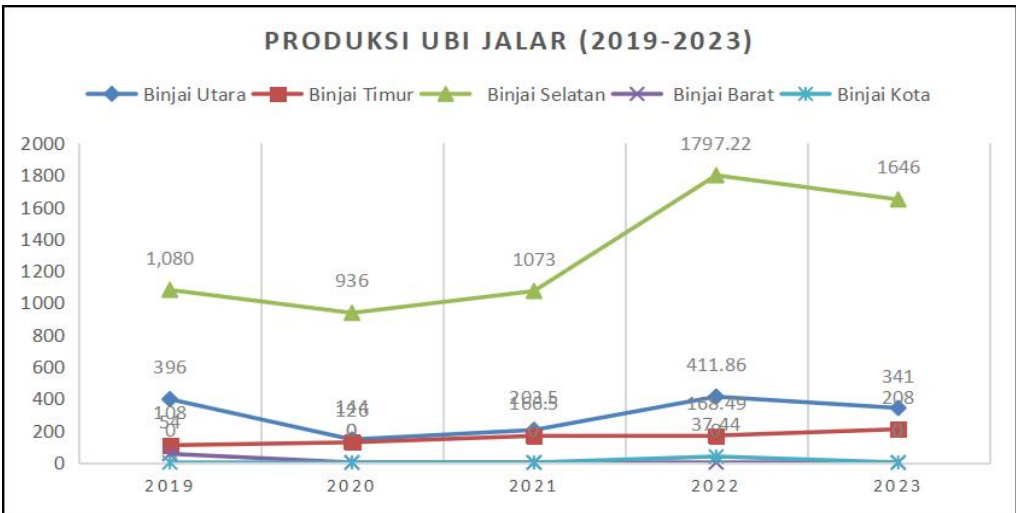
Produksi ubi jalar terbesar selama kurun waktu 5 tahun (2019 - 2023) terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 2.415 ton. Kecamatan Binjai Selatan merupakan penyumbang terbesar, yaitu sebesar 1.797,22 ton, Kecamatan Binjai Utara sebesar 411,86 ton, Kecamatan Binjai Timur sebesar 168,49 ton dan Kecamatan Binjai Kota sebesar 37,44 ton. Rincian produksi ubi jalar tahun 2019 - 2023 disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 .Produksi Ubi Jalar 2019 - 2023 (Ton)

Kabupaten	Ubi jalar				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Binjai Utara	396	144	203,5	411,86	341
2. Binjai Timur	108	126	166,5	168,49	208
3. Binjai Selatan	1.080	936	1.073	1.797,22	1.646
4. Binjai Barat	54	0	0	0	0
5. Binjai Kota	0	0	0	37,44	0
Jumlah	1.638	1.206	1.443	2.415	2.195

Sumber: Binjai Dalam Angka 2019-2023, BPS

Gambar 2.6. Produksi Ubi Jalar 2019-2023 (ton)



2.3. SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN

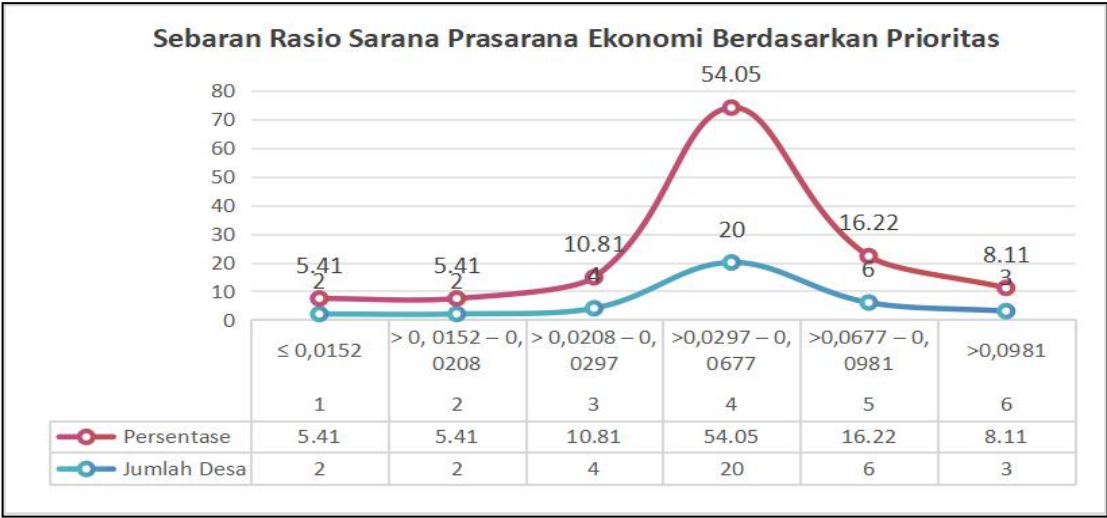
Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 37 Kelurahan di Kota Binjai, 2 kelurahan masuk dalam prioritas 1 (5,41%), 2 kelurahan prioritas 2 (5,41 %) dan 4 kelurahan prioritas 3 (10,81 %).

Tabel 2.7. Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Desa	Persentase
1	1	≤ 0,0152	2	5,41
2	2	> 0, 0152 – 0,0208	2	5,41
3	3	> 0,0208 – 0,0297	4	10,81
4	4	>0,0297 – 0,0677	20	54,05
5	5	>0,0677 – 0,0981	6	16,22
6	6	>0,0981	3	8,11

Gambar 2.7. Sebaran Rasio Sarana Prasarana Ekonomi berdasarkan Prioritas



2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Laju pertumbuhan penduduk Kota Binjai dari tahun 2019-2023 mencapai 1,4% per tahun sementara pertumbuhan produksi padi dan jagung mencapai 1,48 % dan 4,30%. Rata-rata kepemilikan lahan petani di Kota Binjai adalah sebesar 0,24 ha. Rasio lahan pertanian dibandingkan lahan total adalah sebesar 0,22 (22%). Rasio sarana ekonomi penyedia pangan pada prioritas 1-3 mencapai 21,62 %. Hal tersebut menjadi tantangan dalam pemenuhan ketersediaan pangan.

Strategi untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Kebijakan Kota Binjai mengenai ketersediaan pangan pada periode 2021-2026 bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iii) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

- (i) Peningkatan produktivitas
 - a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
 - b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
 - c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
 - d. Pengelolaan air
 - e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian
 - f. Pembangunan sumur pompa dan embung
- (ii) Pengendalian Konversi Lahan Sawah
 - a. Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Pelarangan Alih Fungsi Lahan Sawah.
- (iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
 - b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen
- (iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
 - a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
 - b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
 - c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
 - d. Pemasaran produk pertanian, misal TTI (Toko Tani Indonesia) dan lain-lain.

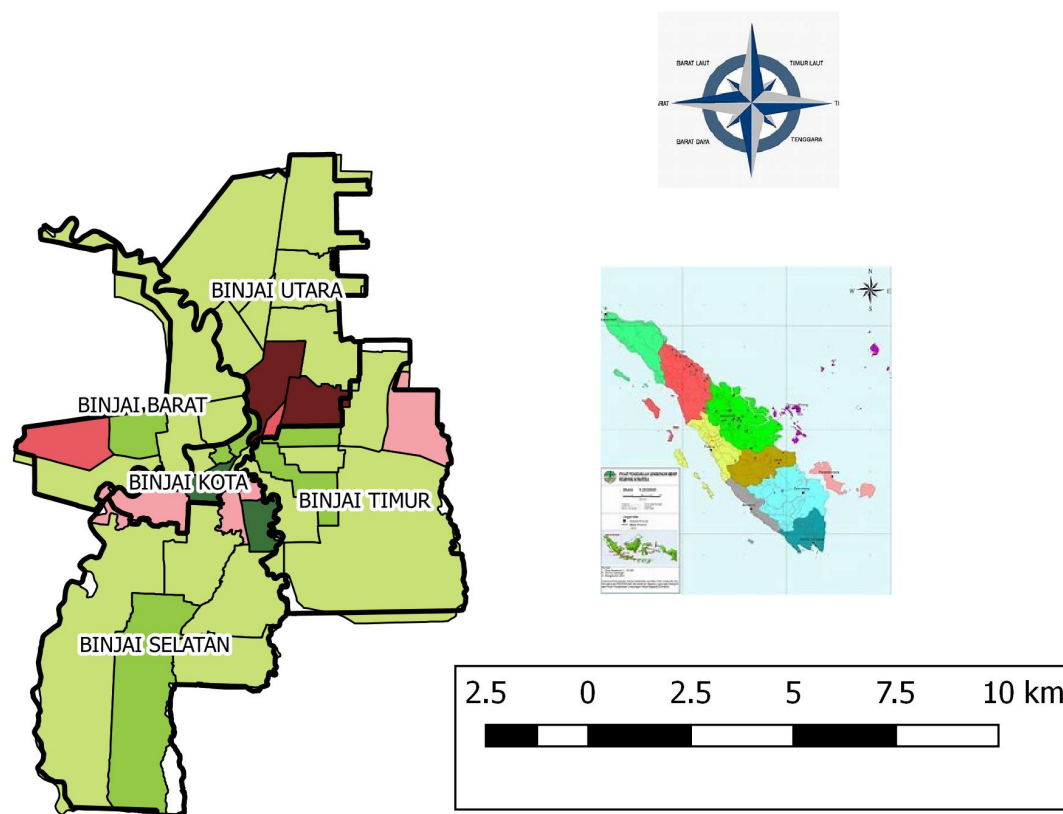


PETA SARANA DAN PRASARANA PENYEDIA PANGAN KOTA BINJAI TAHUN 2024



98.507

98.635



Legenda

BATAS KECAMATAN

PETA SAPRAS PENYEDIA PANGAN TAHUN 2024

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

SUMBER DATA :

1. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOTA BINJAI
2. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BINJAI 2024

PETA DISUSUN OLEH :

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BINJAI

98.507

98.635

BAB III
AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi**: kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial**: modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; dan (2) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kota Binjai. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kota Binjai terus mengalami penurunan dari 5,66 % (15.610 jiwa) tahun 2019 menjadi 4,79 % (13.850 jiwa) tahun 2023.

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kota Binjai

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase penduduk miskin	5,66	5,71	5,81	5,10	4,79

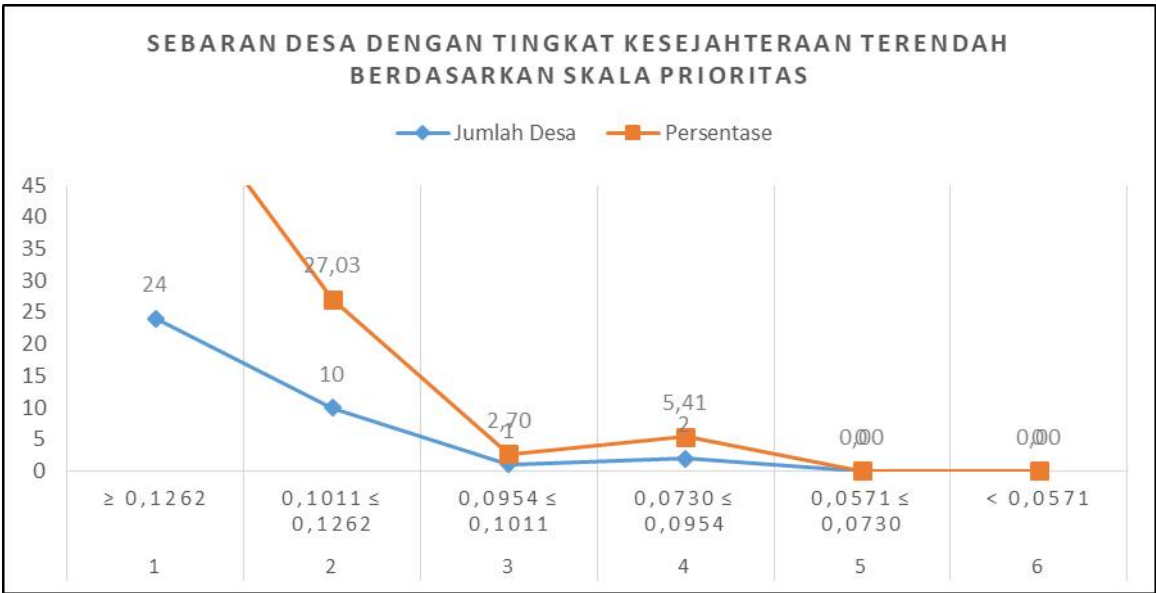
Sumber: Binjai Dalam Angka, BPS

Pada tingkat kelurahan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tahun 2023, terdapat kelurahan yang memiliki rasio rumah tangga dengan dengan tingkat kesejahteraan terendah sebanyak 24 Kelurahan (64,86%) masuk prioritas 1. Sebanyak 10 Kelurahan (27,02%) masuk Prioritas 2 dan 1 Kelurahan (2,7%) masuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kota Binjai ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 35 Kelurahan tersebut. Penurunan garis kemiskinan tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik sebagai dampak dari upaya pemerintah dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan. Penurunan garis kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan kesenjangan antar penduduk miskin dan kaya. Kegiatan perekonomian sudah berjalan seperti biasa tetapi pendapatan dan daya beli masyarakat masih rendah. Hal tersebut masih terbatasnya lapangan pekerjaan, kenaikan harga di beberapa sektor yang mengakibatkan terjadinya inflasi.

Tabel 3.2 Sebaran desa dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,1262$	24	64,86
2	$0,1011 \leq 0,1262$	10	27,02
3	$0,0954 \leq 0,1011$	1	2,7
4	$0,0730 \leq 0,0954$	2	5,4
5	$0,0571 \leq 0,0730$	0	0
6	$< 0,0571$	0	0

Gambar 3.1 Grafik Sebaran Desa dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah berdasarkan Skala Prioritas



3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian,

peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021, BPS dan Dinas Perhubungan Kota Binjai, semua kelurahan memiliki akses penghubung yang baik. Berdasarkan skala prioritas 37 Kelurahan di Kota Binjai memiliki akses penghubung yang berada di prioritas 4 dimana akses jalan/penghubung bias dilalui sepanjang tahun.

3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Akses terhadap Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kota Binjai untuk menanggulangi kemiskinan seperti yang termuat dalam RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026 diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin
- Pengembangan wirausaha industri kreatif berbasis komunitas.
- Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Taman Teknologi Kota Binjai”
- Pemanfaat inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMKM ekonomi kreatif.
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh
- Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan guna mendukung akselerasi pergerakan masyarakat.
- Penyediaan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim.
- Peningkatan sistem jaringan dan kualitas layanan air bersih.
- Menyediakan rumah layak huni yang ramah lingkungan yaitu pembangunan dan pengelolaan rumah susun sewan (rusunawa) yang terjangkau masyarakat.

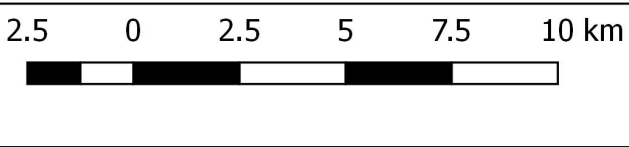
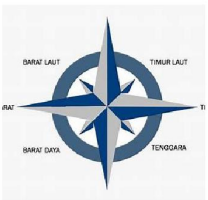
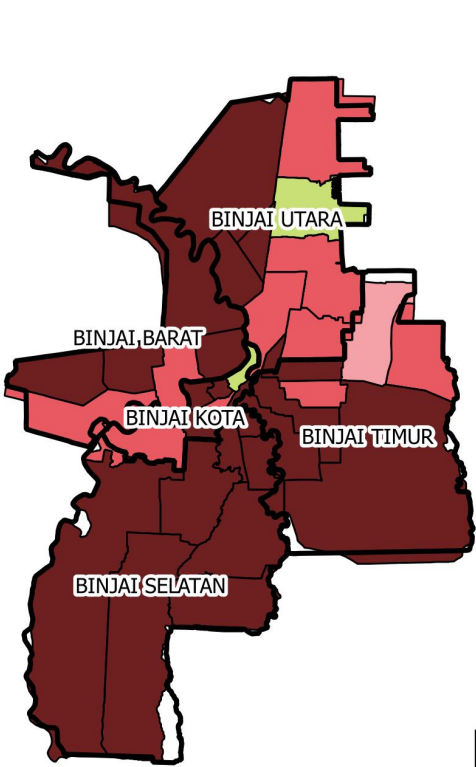


PETA PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TERENDAH KOTA BINJAI TAHUN 2024



98.5072000

98.6348000



Legenda

BATAS KECAMATAN
PETA PENDUDUK DTKS

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

SUMBER DATA :
DINAS SOSIAL KOTA BINJAI

PETA DISUSUN OLEH :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BINJAI

98.5072000

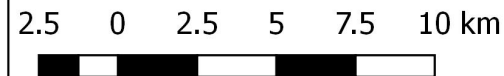
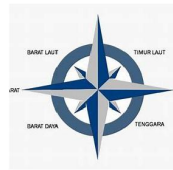
98.6348000

PETA KELURAHAN YANG TIDAK MEMILIKI AKSES PENGHUBUNG MEMADAI KOTA BINJAI TAHUN 2024



98.507

98.635



Legenda

BATAS KECAMATAN

PETA KEL TDK MEMILIKI AKSES PENGHUBUNG MEMADAI

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

SUMBER DATA :

1. PODES 2021
2. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI

PETA DISUSUN OLEH :

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA BINJAI

98.507

98.635

BAB IV

PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (seperti saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kota Binjai, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di kelurahan. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak¹. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

Berdasarkan Skala Prioritas, seluruh Kelurahan di Kota Binjai masuk kedalam Prioritas 6 (100%), yang artinya seluruh Kelurahan di Kota Binjai telah memiliki akses air bersih. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan sarana dan prasarana akses air bersih menuju peningkatan kualitas air yang layak untuk dikonsumsi rumah tangga.

Tabel 4.1 Sebaran kelurahan berdasarkan rumah tangga tanpa akses air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Desa	Persentase
1	$\geq 0,0000$	0	0
2	$0,0000 \leq 0,0000$	0	0
3	$0,0000 \leq 0,0000$	0	0
4	$0,0000 \leq 0,0000$	0	0
5	$0,0000 \leq 0,0000$	0	0
6	$< 0,0000$	37	100

4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk kelurahan per tenaga kesehatan yang terdiri dari: (1) Dokter umum/spesialis; (2) Dokter gigi; (3) Bidan; dan (4) Tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan dengan kepadatan penduduk.

¹ Permenkes 416 Tahun 1990

Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah desa untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

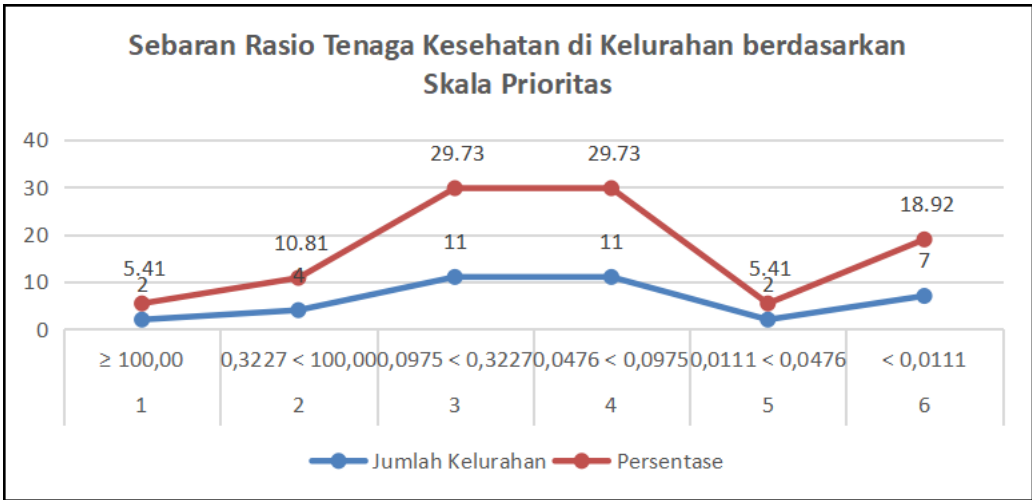
Berdasarkan Data Tenaga Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Binjai Tahun 2023, terdapat 8 Puskesmas Induk, 18 Puskesmas Pembantu (PUSTU) serta 3 Rumah Sakit milik Pemerintah dan 8 Rumah Sakit milik Swasta. Meskipun begitu penyebaran tenaga kesehatan masih belum merata di setiap Kelurahan karena masih ada 2 Kelurahan yang tidak memiliki Puskesmas, Rumah Sakit ataupun Tenaga Kesehatan sendiri.

Berdasarkan skala prioritas ada 2 Kelurahan yang masuk dalam prioritas 1 (5,41%) adalah Kelurahan Bhakti Karya dan Kelurahan Tangsi. Sedangkan yang masuk dalam prioritas 2 (10,81%) sebanyak 4 Kelurahan antara lain Kelurahan Setia, Kelurahan Tunggurono, Kelurahan Damai, dan Kelurahan Cengkeh Turi. Kelurahan yang termasuk dalam prioritas 3 (29,73%) ada 11 Kelurahan yaitu Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Tanah Seribu, Kelurahan Pujidadi, Kelurahan Berngam, Kelurahan Pekan Binjai, Kelurahan Sumber Karya, Kelurahan Jatinegara, kelurahan Jati Karya, Jati Utomo, Kelurahan Limau Mungkur dan Kelurahan Paya Roba.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di kelurahan berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	$\geq 100,0000$	2	5,41
2	$0,3227 \leq 100,0000$	4	10,81
3	$0,0975 \leq 0,3227$	11	29,73
4	$0,0476 \leq 0,0975$	11	29,73
5	$0.0111 \leq 0,0476$	2	5,41
6	$< 0,0111$	7	18,92

Gambar 4.1 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Kelurahan berdasarkan Skala Prioritas



4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

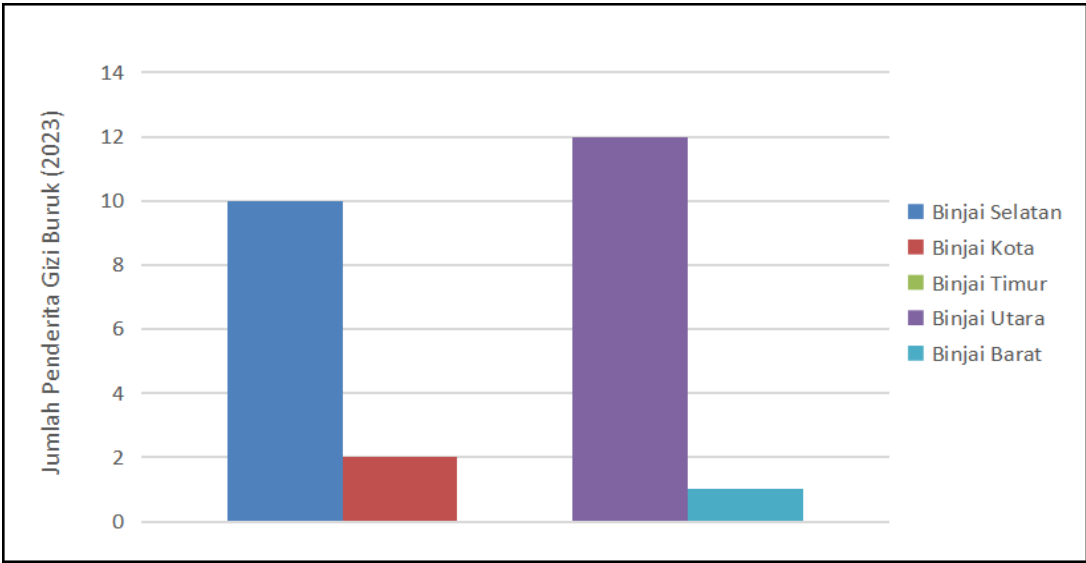
- 1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan *underweight* (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
- 2. Pendek atau *stunting* (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
- 3. Kurus atau *wasting* (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk di Kota Binjai pada tahun 2023 sebanyak 25 balita. Jumlah penderita gizi buruk mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, penurunan ini disebabkan karena meningkatnya status gizi bayi dan balita sebagai efek dari berhasilnya program pemerintah dalam menurunkan angka gizi buruk pada bayi dan balita. Jumlah penderita gizi buruk terbanyak terdapat di Kecamatan Binjai Utara (12 balita), Kecamatan Binjai Selatan (10 balita).

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk 2019-2023

No.	Kecamatan	Penderita Gizi Buruk				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Binjai Selatan	7	11	35	1	10
2	Binjai Kota	1	6	14	7	2
3	Binjai Timur	4	3	10	25	0
4	Binjai Utara	0	0	0	18	12
5	Binjai Barat	5	8	14	1	1
	Total	17	28	73	52	25

Gambar 4.2 Grafik Penderita Gizi Buruk

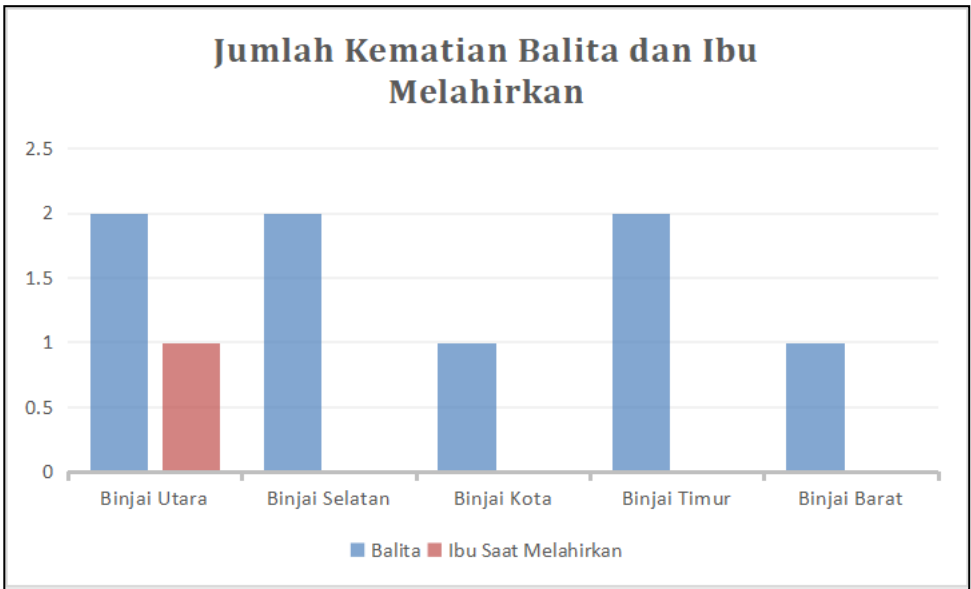


Angka kematian balita dan ibu saat melahirkan merupakan dampak dari status kesehatan dan gizi. Angka kematian balita di Kota Binjai adalah 8 jiwa. Sementara angka kematian ibu saat melahirkan di Kota Binjai 1 jiwa. Angka kematian ibu saat melahirkan berada di Kecamatan Binjai Utara (1 jiwa). Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.4 Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita	Jumlah Kematian Ibu Saat Melahirkan	Total
1	Binjai Utara	2	1	3
2	Binjai Selatan	2	0	2
3	Binjai Kota	1	0	1
4	Binjai Timur	2	0	2
5	Binjai Barat	1	0	1
	Total	8	1	9

Gambar 4.3 Grafik Jumlah Kematian Balita dan Ibu Saat Melahirkan per Kecamatan



4.4. STRATEGI PENINGKATAN PEMANFAATAN PANGAN

Strategi Untuk Memperbaiki Status Gizi dan Kesehatan Kelompok Rentan

Masalah gizi buruk masih tetap tinggi di Kota Binjai, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama *stunting* dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat

dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi *stunting*, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompok rentan gizi, memahami penyebab kurang gizi yang bersifat multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasinya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi.

Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
 - a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut “jendela peluang (*window of opportunity*)” karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan, kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pada anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.
 - b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya dirawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
 - c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
 - d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani), sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi *stunting* pada balita juga cukup tinggi.
2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).

Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut bersifat multisektor.

 - a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
 - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (*sprinkle*) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurang-kurangnya 4 kali selama periode kehamilan.

- Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
 - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
 - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bisa dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
 - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas- fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Kementerian Kesehatan.
 - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.
- b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)
3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi dibidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

Strategi Pemerintah Kota Binjai dalam memperbaiki status gizi Kesehatan secara berkelanjutan :

- Melakukan pembinaan dan dukungan terhadap aktivitas posyandu agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dimasa depan dan menghilangkan stunting di Kota Binjai
- Memberlakukan standar pertumbuhan anak.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendirikan fasilitas penyediaan posyandu.

- Menerapkan standar pemberian makanan pada bayi dan anak.
- Pemberian makanan tambahan diberikan pada bayi gizi kurang, ibu hamil, ibu nifas serta fortifikasi makanan.
- Penyediaan pelayanan Kesehatan berkualitas, merata dan responsif yang didukung oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memadai dan merata.
- Meningkatkan usaha perbaikan gizi keluarga yang diarahkan kepada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
- Meningkatkan akses kualitas air bersih yang layak dan sanitasi pada rumah tangga.

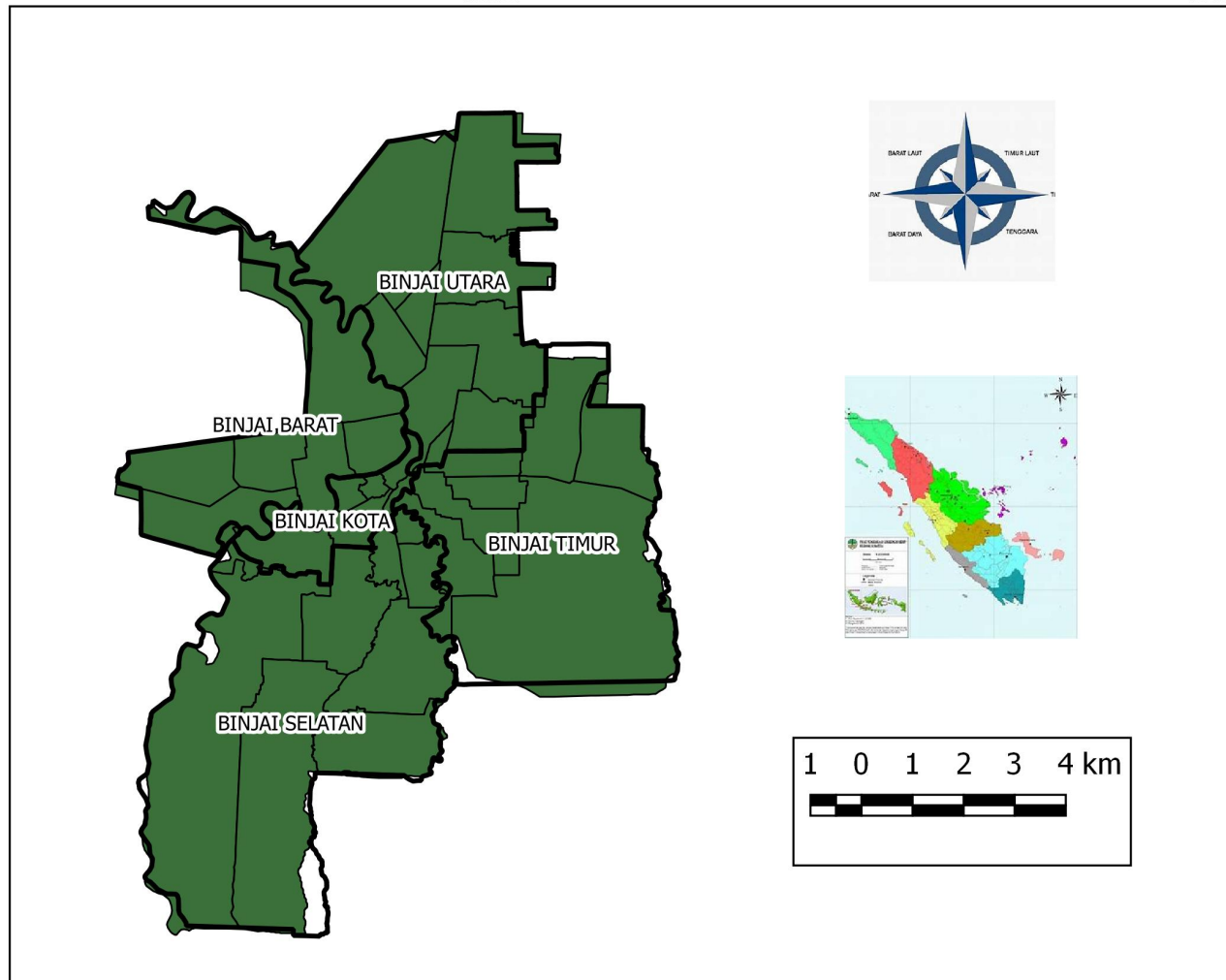


PETA RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH KOTA BINJAI TAHUN 2024



98.507

98.635



98.507

98.635

Legenda

BATAS KECAMATAN

PETA RT TANPA AKSES AIR BERSIH

Prioritas 1

Prioritas 2

Prioritas 3

Prioritas 4

Prioritas 5

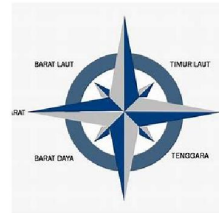
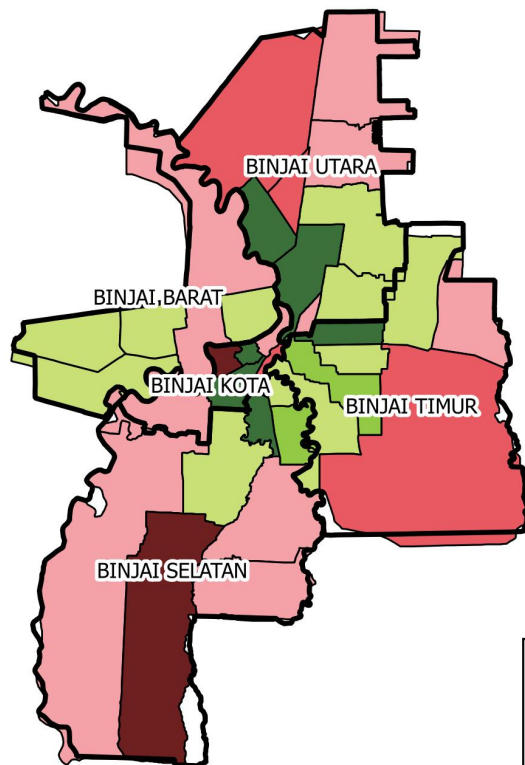
Prioritas 6

SUMBER DATA :
DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI

PETA DISUSUN OLEH :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI



PETA TENAGA KESEHATAN TERHADAP KEPADATAN PENDUDUK KOTA BINJAI TAHUN 2024



Legenda

 BATAS KECAMATAN
PETA NAKES THD DENSITY

-  Prioritas 1
-  Prioritas 2
-  Prioritas 3
-  Prioritas 4
-  Prioritas 5
-  Prioritas 6

SUMBER DATA :

1. DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
2. BADAN PUSAT STATISTIK KOTA BINJAI

PETA DISUSUN OLEH :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI
TAHUN 2024

BAB V
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab 2, 3 dan 4. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit (Peta 6.1) ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, kelurahan-kelurahan dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

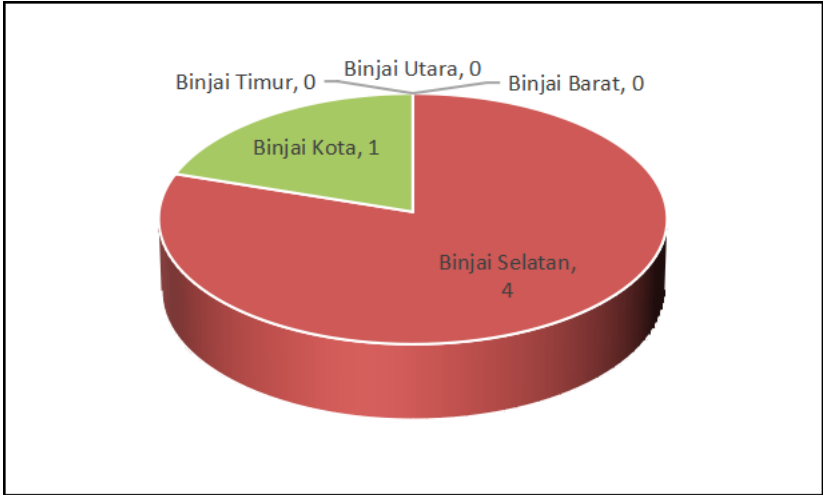
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 37 kelurahan yang ada di Kota Binjai tidak ditemukan kelurahan yang masuk dalam Prioritas 1, ada 5 kelurahan yang termasuk kedalam Prioritas 2, 16 kelurahan yang termasuk kedalam Prioritas 3 dan prioritas 4, tidak ada kelurahan yang masuk kedalam Prioritas 5 dan 6.

Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Kelurahan berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Kelurahan	Persentase
1	0	0
2	5	13,52
3	16	43,24
4	16	43,24
5	0	0
6	0	0

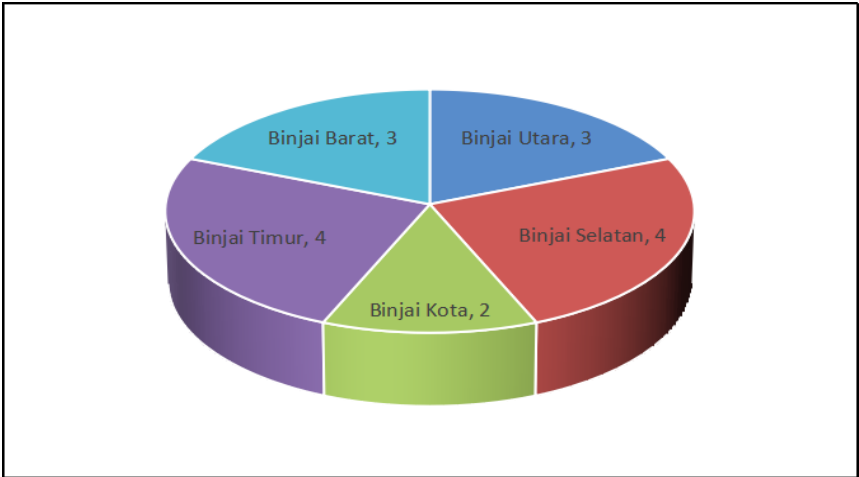
Tidak ada kelurahan di Kota Binjai yang termasuk kedalam Prioritas 1 (tingkat rentan pangan tinggi). Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 (tingkat rentan pangan sedang) terdapat di 2 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Binjai Selatan (Kelurahan Tanah Merah, Kelurahan Bakti Karya, Kelurahan Tanah Seribu dan Kelurahan Rambung Timur), Kecamatan Binjai Kota (Kelurahan Tangsi). (Gambar 5.1).

Gambar 5.1. Sebaran Jumlah Kelurahan Priroitas 2 Per Kecamatan



Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Binjai Selatan (Kelurahan Pujidadi, Kelurahan Binjai Estate, Kelurahan Rambung Dalam, dan Kelurahan Rambung Barat), Kecamatan Binjai Kota (Kelurahan Setia dan Kelurahan Binjai), Kecamatan Binjai Timur (Kelurahan Mencirim, Kelurahan Tunggurono, Kelurahan Timbang Langkat, dan Kelurahan Tanah Tinggi), Kecamatan Binjai Utara (Kelurahan Jati Negara, Kelurahan Kebun Lada dan Kelurahan Cengkeh Turi), dan Kecamatan Binjai Barat (Kelurahan Limau Sundai, Kelurahan Payaroba dan Kelurahan Suka Maju). (Gambar 5.2).

Gambar 5.2. Sebaran Jumlah Kelurahan Priroitas 3 per Kecamatan



5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 2 secara umum disebabkan oleh: (1) masih banyak keluarga dengan kondisi kurang sejahtera, (2) sarana pangan dengan jumlah penduduk belum memadai, (3) Kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut dilihat dari rasio tenaga kesehatan dalam melayani jumlah penduduk wilayah tersebut.

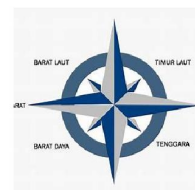
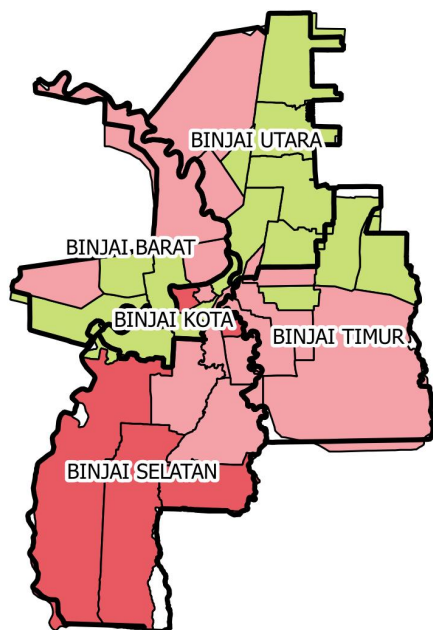
Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 3 secara umum disebabkan oleh : (1) sarana pangan dengan jumlah penduduk belum memadai, (2) Rendah nya tingkat kesejahteraan keluarga di wilayah tersebut, (3). Kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut dilihat dari rasio tenaga kesehatan dalam melayani jumlah penduduk wilayah tersebut.

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (KOMPOSIT) KOTA BINJAI TAHUN 2024



98.507

98.635



2.5 0 2.5 5 7.5 10 km



Legenda

BATAS KECAMATAN
FSVA KOMPOSIT BINJAI

- Prioritas 1
- Prioritas 2
- Prioritas 3
- Prioritas 4
- Prioritas 5
- Prioritas 6

SUMBER DATA DARI :

- 1.DINAS KETAPANGTAN KOTA BINJAI
- 2.DINAS KESEHATAN KOTA BINJAI
- 3.DINAS SOSIAL KOTA BINJAI
4. DISNAKER DAN PERINDAG KOTA BINJAI
5. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BINJAI
6. BADAN PUSAT STATISTIK

PETA DISUSUN OLEH :
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BINJAI
2024

98.507

98.635

No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
1	BINJAI SELATAN	1275051	1275051001	TANAH MERAH	0	4	1	4	6	3	48.28	35	2
2	BINJAI SELATAN	1275051	1275051003	BHAKTI KARYA	0	5	1	4	6	1	33.61	36	2
3	BINJAI SELATAN	1275051	1275051006	TANAH SERIBU	0	4	1	4	6	3	48.98	33	2
4	BINJAI SELATAN	1275051	1275051005	PUJI DADI	0	4	1	4	6	3	51.61	22	3
5	BINJAI SELATAN	1275051	1275051002	BINJAI ESTATE	0	4	1	4	6	4	51.49	24	3
6	BINJAI SELATAN	1275051	1275051007	RAMBUNG BARAT	0	3	1	4	6	6	50.18	32	3
7	BINJAI SELATAN	1275051	1275051004	RAMBUNG DALAM	0	6	1	4	6	5	51.53	23	3
8	BINJAI SELATAN	1275051	1275051008	RAMBUNG TIMUR	0	3	1	4	6	4	48.32	34	2
9	BINJAI KOTA	1275021	1275021001	BERNGAM	0	3	2	4	6	3	54.90	12	4
10	BINJAI KOTA	1275021	1275021002	SATRIA	0	6	1	4	6	6	53.76	14	4
11	BINJAI KOTA	1275021	1275021003	SETIA	0	4	1	4	6	2	50.28	30	3
12	BINJAI KOTA	1275021	1275021004	KARTINI	0	6	2	4	6	6	55.14	10	4
13	BINJAI KOTA	1275021	1275021005	TANGSI	0	4	1	4	6	1	33.12	37	2
14	BINJAI KOTA	1275021	1275021006	BINJAI	0	5	1	4	6	6	50.39	29	3
15	BINJAI KOTA	1275021	1275021007	PEKAN BINJAI	0	5	4	4	6	3	60.34	1	4
16	BINJAI TIMUR	1275041	1275041004	MENCIRIM	0	4	1	4	6	4	50.66	28	3
17	BINJAI TIMUR	1275041	1275041005	TUNGGURONO	0	4	1	4	6	2	52.98	19	3
18	BINJAI TIMUR	1275041	1275041002	DATARAN TINGGI	0	4	2	4	6	4	56.27	7	4
19	BINJAI TIMUR	1275041	1275041003	TIMBANG LANGKAT	0	5	1	4	6	5	50.79	27	3
20	BINJAI TIMUR	1275041	1275041001	TANAH TINGGI	0	5	1	4	6	6	52.44	20	3
21	BINJAI TIMUR	1275041	1275041006	SUMBER MULYOREJO	0	4	3	4	6	4	57.51	3	4
22	BINJAI TIMUR	1275041	1275041007	SUMBER KARYA	0	3	2	4	6	3	56.03	8	4
23	BINJAI UTARA	1275011	1275011001	PAHLAWAN	0	1	2	4	6	6	56.47	6	4
24	BINJAI UTARA	1275011	1275011002	JATINEGARA	0	2	1	4	6	3	53.09	17	3
25	BINJAI UTARA	1275011	1275011003	NANGKA	0	1	2	4	6	4	54.94	11	4
26	BINJAI UTARA	1275011	1275011008	JATI MAKMUR	0	4	2	4	6	4	54.63	13	4
27	BINJAI UTARA	1275011	1275011004	DAMAI	0	4	1	4	6	2	53.35	16	4
28	BINJAI UTARA	1275011	1275011005	KEBUN LADA	0	4	1	4	6	6	50.83	25	3
29	BINJAI UTARA	1275011	1275011006	CENGKEH TURI	0	4	1	4	6	2	53.00	18	3
30	BINJAI UTARA	1275011	1275011009	JATI KARYA	0	4	4	4	6	3	58.17	2	4
31	BINJAI UTARA	1275011	1275011007	JATI UTOMO	0	4	2	4	6	3	56.90	4	4
32	BINJAI BARAT	1275031	1275031001	BANDAR SENEMBAH	0	4	2	4	6	4	55.75	9	4
33	BINJAI BARAT	1275031	1275031002	LIMAU MUNGKUR	0	4	2	4	6	3	56.56	5	4
34	BINJAI BARAT	1275031	1275031003	LIMAU SUNDAI	0	4	1	4	6	4	50.20	31	3
35	BINJAI BARAT	1275031	1275031004	PAYA ROBA	0	4	1	4	6	3	50.83	26	3
36	BINJAI BARAT	1275031	1275031005	SUKA MAJU	0	2	1	4	6	4	51.97	21	3
37	BINJAI BARAT	1275031	1275031006	SUKA RAMAI	0	5	1	4	6	4	53.73	15	4

BAB VI
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (Kelurahan), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah Kelurahan diprioritaskan pada:

- Kelurahan prioritas 1, 2 dan 3 yang tersebar di Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Kota, Kecamatan Binjai Utara, Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Barat.
- Kelurahan yang lokasinya jauh dari kota Binjai atau di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain.
- Kelurahan – kelurahan yang menghadapi kendala akses fisik terhadap sumber pangan.
- Kelurahan – Kelurahan yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDM nya yang masih terbatas.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di desa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah Kota Binjai diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Peningkatan produktivitas lahan pertanian.
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial;

serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.

- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih; sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) di setiap Kelurahan dengan melengkapi sarana dan prasarana alat kesehatan di setiap Puskesmas Pembantu.
- f. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing industri kreatif dengan pemanfaatan IPTEK.
- g. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui pemerataan penyebaran tenaga kesehatan di setiap Kelurahan.
- h. Peningkatan kinerja layanan RSUD dan Puskesmas Induk atau Puskesmas Pembantu (PUSTU) sesuai standard dan keselamatan pasien.
- i. Pengadaan cadangan pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mengalami krisis pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat yang mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
SUMBER DATA FSVA
KOTA BINJAI
TAHUN 2024

Sumber Data						UPDATE Pusdatin 2023	UPDATE BPS 2023	UPDATE DINAS TENAGA KERJA 2023	UPDATE DATA DINAS SOSIAL 2023	UPDATE DINAS PERHUBUNGAN 2023	UPDATE DINAS KESEHATAN 2023	UPDATE DINAS KESEHATAN 2023	UPDATE BPS 2023	UPDATE DINAS KESEHATAN 2023
No.	Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Kode Desa	1. Luas lahan baku sawah (Ha) 2023	Luas Wilayah (Ha) 2023	2. Jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan	3. Jmlh Pddk tingkat kejahteraan	4. Desa yang tidak memiliki akses	5. Jmlh RT tanpa akses air bersih 2023	6. Jumlah tenaga kehatan 2023	Jumlah Penduduk 2023	Jumlah Rumah Tangga 2023
1	SUMUT	BINJAI	BINJAI SELATAN	TANAH MERAH	1275051001	0.00	650	70	1,316	1	0	21	7,517	2,405
2	SUMUT	BINJAI	BINJAI SELATAN	BHAKTI KARYA	1275051003	0.00	919	113	1,112	1	0	0	6,514	5,198
3	SUMUT	BINJAI	BINJAI SELATAN	TANAH SERIBU	1275051006	0.00	499	72	1,575	1	0	26	9,405	2,065
4	SUMUT	BINJAI	BINJAI SELATAN	PUJI DADI	1275051005	0.00	355	95	1,285	1	87	14	8,798	1,912
5	SUMUT	BINJAI	BINJAI SELATAN	BINJAI ESTATE	1275051002	0.00	361	149	2,383	1	0	48	16,181	2,797
6	SUMUT	BINJAI	BINJAI SELATAN	RAMBUNG BARAT	1275051007	0.00	80	20	654	1	0	409	4,139	3,055
7	SUMUT	BINJAI	BINJAI SELATAN	RAMBUNG DALAM	1275051004	0.00	93	117	866	1	0	45	5,890	1,398
8	SUMUT	BINJAI	BINJAI SELATAN	RAMBUNG TIMUR	1275051008	0.00	40	23	612	1	0	7	3,212	1,113
9	SUMUT	BINJAI	BINJAI KOTA	BERNGAM	1275021001	0.00	179	39	1,245	1	0	16	10,407	3,326
10	SUMUT	BINJAI	BINJAI KOTA	SATRIA	1275021002	0.00	40	83	499	1	0	607	3,869	1,273
11	SUMUT	BINJAI	BINJAI KOTA	SETIA	1275021003	0.00	35	62	752	1	0	1	4,799	1,578
12	SUMUT	BINJAI	BINJAI KOTA	KARTINI	1275021004	0.00	35	118	393	1	0	92	3,335	1,141
13	SUMUT	BINJAI	BINJAI KOTA	TANGSI	1275021005	0.00	42	27	555	1	0	0	3,444	1,137
14	SUMUT	BINJAI	BINJAI KOTA	BINJAI	1275021006	0.00	40	66	488	1	0	51	3,122	1,039
15	SUMUT	BINJAI	BINJAI KOTA	PEKAN BINJAI	1275021007	0.00	41	134	419	1	0	4	5,543	1,907
16	SUMUT	BINJAI	BINJAI TIMUR	MENCIRIM	1275041004	0.00	142	69	1,597	1	0	15	10,371	2,300
17	SUMUT	BINJAI	BINJAI TIMUR	TUNGGURONO	1275041005	0.00	1,066	143	1,565	1	0	14	11,651	1,894
18	SUMUT	BINJAI	BINJAI TIMUR	DATARAN TINGGI	1275041002	0.00	81	42	609	1	0	15	5,608	1,968
19	SUMUT	BINJAI	BINJAI TIMUR	TIMBANG LANGKA	1275041003	0.00	231	106	898	1	0	130	5,868	3,267
20	SUMUT	BINJAI	BINJAI TIMUR	TANAH TINGGI	1275041001	0.00	80	125	976	1	0	74	6,989	3,781
21	SUMUT	BINJAI	BINJAI TIMUR	SUMBER MULYORE	1275041006	0.00	258	157	1,402	1	0	27	14,225	4,446
22	SUMUT	BINJAI	BINJAI TIMUR	SUMBER KARYA	1275041007	0.00	312	72	1,515	1	0	14	13,735	4,289
23	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	PAHLAWAN	1275011001	0.00	117	23	1,279	1	0	201	11,946	4,038
24	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	JATINEGARA	1275011002	0.00	31	18	480	1	0	2	3,575	1,195
25	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	NANGKA	1275011003	0.00	121	31	1,315	1	0	24	11,016	3,521
26	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	JATI MAKMUR	1275011008	0.00	332	120	1,341	1	0	44	11,007	2,322
27	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	DAMAI	1275011004	0.00	75	111	965	1	0	1	7,347	1,949
28	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	KEBUN LADA	1275011005	0.00	135	53	931	1	0	369	6,097	4,586
29	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	CENGKEH TURI	1275011006	0.00	1,008	118	1,961	1	0	19	14,587	4,184
30	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	JATI KARYA	1275011009	0.00	221	90	1,068	1	0	17	11,469	3,505
31	SUMUT	BINJAI	BINJAI UTARA	JATI UTOMO	1275011007	0.00	319	84	1,404	1	0	28	13,570	3,673
32	SUMUT	BINJAI	BINJAI BARAT	BANDAR SENEMBA	1275031001	0.00	221	52	800	1	0	35	7,093	2,318
33	SUMUT	BINJAI	BINJAI BARAT	LIMAU MUNGKUR	1275031002	0.00	117	74	726	1	0	9	6,837	2,185
34	SUMUT	BINJAI	BINJAI BARAT	LIMAU SUNDAL	1275031003	0.00	111	58	1,287	1	0	12	8,162	2,643
35	SUMUT	BINJAI	BINJAI BARAT	PAYA ROBA	1275031004	0.00	400	117	1,801	1	0	39	11,804	3,612
36	SUMUT	BINJAI	BINJAI BARAT	SUKA MAJU	1275031005	0.00	143	42	1,311	1	0	18	9,141	2,876
37	SUMUT	BINJAI	BINJAI BARAT	SUKA RAMAI	1275031006	0.00	94	146	1,332	1	0	13	10,316	3,322

LAMPIRAN 2
VALIDASI DATA
INDIKATOR FSVA
KOTA BINJAI
TAHUN 2024

LAMPIRAN 3
CUT OFF POINT
INDIKATOR FSVA
KOTA BINJAI
TAHUN 2024

LAMPIRAN 4
REKAPITULASI PRIORITAS
KOMPOSIT FSVA
KOTA BINJAI
TAHUN 2024

PRIORITAS 1		PRIORITAS 2		PRIORITAS 3		PRIORITAS 4		PRIORITAS 5		PRIORITAS 6	
Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nama Kecamatan	Nama Desa
-	-	Binjai Selatan	Tanah Merah	Binjai Selatan	Pujidadi	Binjai Kota	Berngam				
		Binjai Selatan	Bhakti Karya	Binjai Selatan	Binjai Estate	Binjai Kota	Satria				
		Binjai Selatan	Tanah Seribu	Binjai Selatan	Rambung Barat	Binjai Kota	Kartini				
		Binjai Selatan	Rambung Timur	Binjai Selatan	Rambung Dalam	Binjai Kota	Pekan Binjai				
		Binjai Kota	Tangsi	Binjai Kota	Setia	Binjai Timur	Dataran Tinggi				
				Binjai Kota	Binjai	Binjai Timur	Sumber Mulyorejo				
				Binjai Timur	Mencirim	Binjai Timur	Sumber Karya				
				Binjai Timur	Tunggurono	Binjai Utara	Pahlawan				
				Binjai Timur	Timbang Langkat	Binjai Utara	Nangka				
				Binjai Timur	Tanah Tinggi	Binjai Utara	Jati Makmur				
				Binjai Utara	Jatinegara	Binjai Utara	Damai				
				Binjai Utara	Kebun Lada	Binjai Utara	Jati Karya				
				Binjai Utara	Cengkeh Turi	Binjai Utara	Jati Utomo				
				Binjai Barat	Limau Sundai	Binjai Barat	Bandar Senembah				
				Binjai Barat	Payaroba	Binjai Barat	Limau Mungkur				
				Binjai Barat	Suka Maju	Binjai Barat	Suka Ramai				

LAMPIRAN 5
INDEKS KETAHANAN
PANGAN (IKP) KELURAHAN
KOTA BINJAI
TAHUN 2024

No.	Nama Kec	Kode Kec.	Kode Desa	Nama Desa	INDEKS KOM	PERINGKAT
1	BINJAI KOTA	1275021	1275021007	PEKAN BINJAI	60,34	1
2	BINJAI UTARA	1275011	1275011009	JATI KARYA	58,17	2
3	BINJAI TIMUR	1275041	1275041006	SUMBER MULYOREJO	57,51	3
4	BINJAI UTARA	1275011	1275011007	JATI UTOMO	56,90	4
5	BINJAI BARAT	1275031	1275031002	LIMAU MUNGKUR	56,56	5
6	BINJAI UTARA	1275011	1275011001	PAHLAWAN	56,47	6
7	BINJAI TIMUR	1275041	1275041002	DATARAN TINGGI	56,27	7
8	BINJAI TIMUR	1275041	1275041007	SUMBER KARYA	56,03	8
9	BINJAI BARAT	1275031	1275031001	BANDAR SENEMBAH	55,75	9
10	BINJAI KOTA	1275021	1275021004	KARTINI	55,14	10
11	BINJAI UTARA	1275011	1275011003	NANGKA	54,94	11
12	BINJAI KOTA	1275021	1275021001	BERNGAM	54,90	12
13	BINJAI UTARA	1275011	1275011008	JATI MAKMUR	54,63	13
14	BINJAI KOTA	1275021	1275021002	SATRIA	53,76	14
15	BINJAI BARAT	1275031	1275031006	SUKA RAMAI	53,73	15
16	BINJAI UTARA	1275011	1275011004	DAMAI	53,35	16
17	BINJAI UTARA	1275011	1275011002	JATINEGARA	53,09	17
18	BINJAI UTARA	1275011	1275011006	CENGKEH TURI	53,00	18
19	BINJAI TIMUR	1275041	1275041005	TUNGGURONO	52,98	19
20	BINJAI TIMUR	1275041	1275041001	TANAH TINGGI	52,44	20
21	BINJAI BARAT	1275031	1275031005	SUKA MAJU	51,97	21
22	BINJAI SELATAN	1275051	1275051005	PUJI DADI	51,61	22
23	BINJAI SELATAN	1275051	1275051004	RAMBUNG DALAM	51,53	23
24	BINJAI SELATAN	1275051	1275051002	BINJAI ESTATE	51,49	24
25	BINJAI UTARA	1275011	1275011005	KEBUN LADA	50,83	25
26	BINJAI BARAT	1275031	1275031004	PAYA ROBA	50,83	26
27	BINJAI TIMUR	1275041	1275041003	TIMBANG LANGKAT	50,79	27
28	BINJAI TIMUR	1275041	1275041004	MENCIRIM	50,66	28
29	BINJAI KOTA	1275021	1275021006	BINJAI	50,39	29
30	BINJAI KOTA	1275021	1275021003	SETIA	50,28	30
31	BINJAI BARAT	1275031	1275031003	LIMAU SUNDAI	50,20	31
32	BINJAI SELATAN	1275051	1275051007	RAMBUNG BARAT	50,18	32
33	BINJAI SELATAN	1275051	1275051006	TANAH SERIBU	48,98	33
34	BINJAI SELATAN	1275051	1275051008	RAMBUNG TIMUR	48,32	34
35	BINJAI SELATAN	1275051	1275051001	TANAH MERAH	48,28	35
36	BINJAI SELATAN	1275051	1275051003	BHAKTI KARYA	33,61	36
37	BINJAI KOTA	1275021	1275021005	TANGSI	33,12	37